



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 2 No. 1, April 2023, pages: 51-60
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Politik Lokal: Komoditi Lokal dan Globalisasi (Lambung Ikan Nasional Sebagai Strategi Lompatan Glokalisasi di Maluku

Hendiyani Sigmarlatu

Correspondence Email: sigmarlatuhendiyani@gmail.com

Manuscript submitted: 21-06-2022, Manuscript revised: 29-06-2022, Accepted for publication: 27-04-2023

Keyword:

LIN Maluku 1;
Erik Swyngedouw 2;
Local Community 3;
Globalization 4.

Abstract: *This paper will discuss the process of local commodities as a leap of scale by highlighting the Maluku national fish barn as a strategy for a leap of globalization. This writing will be based on conceptual references and theories of globalization or glocalization. Territorial and scaling networks written from Erik Swyngedouw. This writing uses a discussion strategy which is divided into several parts. The first discusses globalization and its dynamics. This writing is about to depart from Erik Swyngedouw's thoughts where local communities are managed to become global market values, so it is interesting in the context of the National Fish Barn in Maluku.*

Kata Kunci:

Lin Maluku 1;
Erik Swyngedouw 2;
Komunitas Lokal 3;
Globalisasi 4

Abstrak: Penulisan ini akan mendiskusikan proses komoditas lokal sebagai lompatan skala dengan menyoroti lambung ikan nasional Maluku sebagai strategi lompatan glokalisasi. Penulisan ini akan ada pada rujukan konseptual dan teori globalisasi atau glokalisasi. Jaringan teritorial dan penskalaan ulang yang ditulis dari Erik Swyngedouw. Penulisan ini menggunakan strategi pembahasan yang dibagi menjadi beberapa bagian pertama, membahas globalisasi dan dinamikanya kedua, memahami glokalisasi dan adaptasinya ketiga, membahas dinamika lompatan skala keempat, membahas strategi lambung ikan nasional sebagai proses adaptasi skala kenakalan di Maluku. Penulisan ini hendak berangkat dari pemikiran Erik Swyngedouw di mana komunitas lokal dikelola menjadi nilai pasar global, sehingga menarik dikontekskan dengan Lambung Ikan Nasional yang ada di Maluku.

Departemen Politik Pemerintahan,
Universitas Gadjah Mada,
Indonesia

1 Pendahuluan

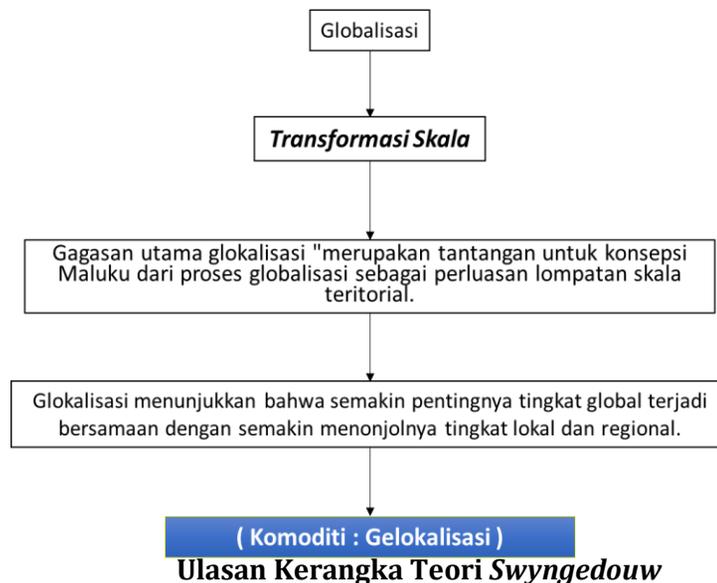
Perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya alam unggulan nasional. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Melalui pembangunan LIN, maka berbagai infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan terpadu, kawasan industri perikanan, sampai bandara internasional yang mampu membawa hasil tangkap produk perikanan di 3 WPPNRI ke pasar internasional juga akan dibangun. LIN akan meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal dengan mengangkat kualitas serta menyediakan jaminan asuransi bagi para nelayan. Sejak tahun 2010, Maluku dicanangkan sebagai lumbung ikan nasional oleh pemerintah. Pencanaan tersebut didasarkan pada potensi perairan Maluku yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) laut Seram, laut Arafura dan laut Banda yang memiliki potensi produksi ikan melimpah. Menurut Bawole dan Apituley (2011) menyatakan bahwa membangun Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional berarti menjadikan daerah tersebut sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu menyuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada secara optimal dan dapat menjamin keberlanjutan sumberdaya tersebut.

Untuk mengetahui nilai indeks dan status kesiapan LIN kota dan kabupaten di wilayah Maluku yang dianalisis berdasarkan keseluruhan dimensi (ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, infrastruktur serta kelembagaan dan kebijakan), dalam penelitian digunakan nilai Indeks Terboboti yang menunjukkan tingkat kepentingannya terhadap kinerja kesiapan LIN. Kategori kesiapan LIN yang tergolong "siap" dimiliki oleh Kota Ambon dan Kota Tual, masing-masing dengan nilai indeks terboboti sebesar 78,88% dan 79,04% pada skala kesiapan LIN berkisar antara 0-100%. Sementara untuk Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Aru dan Kabupaten Buru tergolong dalam kategori "cukup siap", masing-masing dengan nilai indeks terboboti berturut-turut sebesar 65,44; 65,71; 72,05 dan 57,19 pada skala kesiapan LIN berkisar antara 0-100% (Siti Hajar Suryawati dan Tajerin 2015). Sebagai wilayah kepulauan, keberhasilan program M-LIN tergantung pada kontribusi dari masing-masing pulau yang ada di wilayahnya tentang kesiapan berbagai faktor baik sosial, ekonomi, teknologi dan lingkungan serta kebijakan yang akan mendukung keberhasilan program. Sebagai salah satu wilayah kepulauan, Provinsi Maluku juga akan dihadapkan pada karakteristik wilayah yang ada dan berbeda dengan kondisi wilayah lainnya. Menurut (Ginting 2013), karakteristik dari provinsi yang berbasiskan kepulauan diantaranya yaitu: (1) luas wilayah laut yang lebih besar dari wilayah daratan; (2) dari segi sosial ekonomi, aktivitas ekonomi, jenis dan derajat dinamika ekonomi umumnya terbatas dan berskala kecil, serta belum didukung oleh jaringan distribusi dan pemasaran secara memadai; (3) hampir semua provinsi kepulauan berada pada wilayah/ kawasan perbatasan negara, yang memiliki pulau kecil terluar.

Zulham *et al.* (2013) menyatakan bahwa sebagai wilayah kepulauan, pembangunan industri di Provinsi Maluku termasuk sektor kelautan dan perikanan tergolong pembangunan industri dengan biaya tinggi. Oleh sebab itu, perencanaan industri di daerah seperti Provinsi Maluku memerlukan pertimbangan, tingginya biaya produksi akibat dari tingginya biaya transportasi. Dalam Rencana Pengembangan Kawasan Lumbung Ikan Nasional yang didalamnya mencakup rencana strategis dan rencana. Pengembangan wilayah, Kota Ambon difungsikan sebagai pusat pelayanan barang dan jasa dan juga peningkatan kualitas dan mutu lingkungan yang ditekankan pada PPN Ambon. Sejalan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pengembangan industri yaitu sarana prasarana, kondisi eksisting, potensi pengembangan, jarak antar pusat industri merupakan kunci keberhasilan pengembangan industri. Dari pertimbangan faktor tersebut maka Kota Ambon

dikelompokkan sebagai lokasi penyedia jasa utama (Zulham *et al.*, 2013). Sejalan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pengembangan industri yaitu sarana prasarana, kondisi eksisting, potensi pengembangan, jarak antar pusat industri merupakan kunci keberhasilan pengembangan industri. Dari pertimbangan faktor tersebut maka Kota Ambon dikelompokkan sebagai lokasi penyedia jasa utama (Zulham *et al.*, 2013).

Keberhasilan Program M-LIN akan sangat tergantung dari kesiapan setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku untuk mendukung program tersebut. Ambon merupakan wilayah strategis untuk mendukung keberhasilan program M-LIN. Suryawati dan Tajerin (2015) menyatakan bahwa Kota Ambon termasuk dalam kategori “siap” untuk mendukung program M-LIN. Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan mendalam kesiapan mendalam masing-masing dimensi serta atribut apa saja dari masing-masing dimensi yang berpengaruh terhadap kesiapan Kota Ambon untuk mendukung program M-LIN. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transformasi dan telekomunikasi termasuk kemunculan teknologi lainnya, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Globalisasi bukanlah hal baru. Banyak kerajaan besar dan gerakan keagamaan dulu, telah menjalani globalisasi. Perdagangan dan investasi antar negara sudah mempromosikan saling ketergantungan ekonomi dunia selama berabad-abad.



Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980 dan lebih sering lagi pada pertengahan 1990 an. Saat ini perusahaan-perusahaan besar mengatur produksinya pada skala dunia. Setiap langkah ada nilai tambah. Dari penelitian dan pengembangan, hingga pengolahan bahan baku, produksi suku cadang, perakitan komponen, dan pemasaran produk akhir. Ketika globalisasi berlangsung, maka kesejahteraan ekonomi individu akan semakin dipengaruhi oleh kekuatan pasar global. Pada proses globalisasi ini akan muncul dampak yang memunculkan perubahan sikap, nilai dan pola perilaku pada masyarakat. Lembaga seperti WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia dan IMF atau Dana Moneter Internasional kerap jadi sasaran kritik dan protes. Karena banyak keputusan ekonomi didelegasikan ke lembaga-lembaga itu.

Globalisasi telah menjadi semboyan ekonomi internasional di akhir abad kedua puluh. Sungguh disangkal bahwa negara-negara menjadi lebih saling bergantung melalui arus barang jasa dan modal keuangan sejak tahun 1970-an. Semakin pentingnya industrialisasi berorientasi ekspor telah membuat

integrasi ke dalam ekonomi global hampir identik dengan pembangunan di sejumlah negara (Gary Gereffi, 2001). Baru-baru ini proyeksi sistem produksi nasional lintas batas melalui investasi langsung dan subkontrak internasional telah memperdalam interdependensi dan integrasi fungsional ekonomi dunia. Namun ada kesadaran yang akut bahwa keuntungan dari globalisasi sangat tidak merata di dalam maupun di antara masyarakat. Selain itu, globalisasi bisa meningkatkan produktivitas kerja masyarakat dan mendorong peningkatan gerak sosial masyarakat di sisi lainnya juga globalisasi memicu sikap kreatif dan inovasi di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global, mudah mendapatkan barang impor dari luar negeri dengan raga terjangkau, bertambahnya jenis lapangan kerja akibat adanya investasi asing dari luar negeri, terbukanya kesempatan lapangan kerja di luar negeri.

Dampak negatif yang akan terjadi itu bisa memudahkan rasa nasionalisme dan rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Ini juga akan memunculkan kesenjangan ekonomi dan benturan budaya di masyarakat seperti pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor, masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal dan matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Dinamika globalisasi semakin dalam bentuk penekanan dan perubahan pada tingkat lokal pada perkembangan nilai luar yang semakin daripada nilai kelokalan, tetapi pada bagian ini akan meng transformasi ulang globalisasi. Proses glocalisasi mengacu pada proses di mana, pertama, pengaturan kelembagaan /peraturan bergeser dari skala nasional baik ke skala supranasional atau global dan turun ke skala badan individu atau ke konfigurasi lokal, perkotaan atau regional dan kedua, kegiatan ekonomi dan jaringan antar perusahaan secara bersamaan menjadi lebih terlokalisasi/regionalisasi dan transnasional. Secara khusus, perhatian akan diberikan pada dinamika politik dan ekonomi dari penskalaan ulang geografis ini dan implikasinya. Skala jaringan ekonomi dan pengaturan kelembagaan disusun kembali dengan cara yang mengubah geometri kekuatan sosial dengan cara yang penting. Glocalisasi yang di rekaman sebagai nilai kelokalan yang menerobos masuk pada globalisasi, proses ini akan dapat direkam pada proses memahami dinamika lompatan skala. Adaptasi kelokalan di rencang pada wilayah teritorial dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada.

Memahami lompatan skala dan dinamika Erik Swyngedouw menggunakan singkatnya, 'skala' spasial harus didefinisikan sebagai sesuatu yang 'diproduksi' sebuah proses yang selalu sangat heterogen dan diperebutkan. Jika kapasitas ke tempat yang tepat didasarkan pada pengontrolan ruang, maka skala perluasan baris perintah akan sangat mempengaruhi kapasitas ini ke tempat yang sesuai. Lebih penting lagi, karena kekuasaan atas tempat yang tepat selalu diperebutkan dan diperebutkan, maka aliansi kelompok-kelompok sosial atau kelas-kelas yang dibentuk dalam skala spasial tertentu akan membentuk kondisi perampasan dan kendali atas tempat dan memiliki pengaruh yang menentukan atas kekuasaan sosio-spasial relatif. Semua ini menunjukkan bahwa perombakan dan penataan ulang skala spasial yang berkelanjutan merupakan bagian integral dari strategi sosial dan perjuangan untuk kontrol dan pemberdayaan.

2 Metode Penelitian

Riset ini menggunakan metode kajian pustaka melalui dokumen serta publikasi ilmiah dari jurnal dan buku. Tinjauan literatur adalah metodologi penelitian yang digunakan. Teknik ini mengumpulkan informasi perpustakaan atau bahan penelitian dari jurnal akademik dan pencarian online, termasuk dua database Pubmed dan Google Scholar (Mufidah, 2021). Teori merupakan kumpulan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematis dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Proposisi merupakan rencana usulan, ungkapan yang dapat

dipercaya, disangsikan, disangkal, atau benar-benar tidak diperlihatkan. Pendapat lain mengatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Dari kedua pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa teori dapat berupa konsep, definisi, proposisi tentang suatu variabel yang dapat dikaji, dikembangkan oleh peneliti (Surahman, dkk, 2020).

3 Hasil dan Diskusi

Dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan ekologi yang heterogen, diatur di tingkat korporeal, lokal, regional, nasional atau internasional, orang-orang yang bergerak, barang dan modal dan informasi hypermobile (jaringan) mengalir menembus dan melampaui skala ini dengan cara yang dapat menjadi sangat eksklusif dan tidak memberdayakan mereka yang beroperasi di tingkat skala lain. Konfigurasi geografis sebagai sekumpulan skala yang saling berinteraksi dan bersarang ('skala gestalt') diproduksi sebagai pertikaian sementara dalam transformasi yang terus-menerus, terkadang transgresif, perebutan kekuasaan sosio-spasial. Perjuangan ini mengubah kepentingan dan peran skala geografis tertentu, menegaskan kembali pentingnya skala lain, terkadang menciptakan skala signifikan yang sama sekali baru, tetapi yang paling penting definisi ulang skala ini mengubah dan mengungkapkan perubahan dalam geometri kekuatan sosial dengan memperkuat kekuatan dan kendali beberapa sementara melemahkan yang lain (lihat juga Swyngedouw, 1993; 1996a). Ini persis proses yang disebut Smith sebagai lompatan skala, sebuah proses yang menandakan bagaimana politik diberi spasial oleh mekanisme peregangan dan kontraksi objek melintasi ruang.

Terpenting menurut saya dalam bagian transformasi skala (proses peregangan) adalah proses yang didorong oleh perjuangan kelas, etnis, gender dan budaya. Di satu sisi, organisasi yang mendominasi berusaha untuk mengontrol yang didominasi dengan membatasi yang terakhir dan organisasi mereka pada skala yang dapat dikelola. Di sisi lain, kelompok subordinasi berusaha membebaskan diri dari batasan skala yang dipaksakan ini dengan memanfaatkan kekuatan dan instrumen pada skala lain. Dalam prosesnya, skala diproduksi secara aktif, dengan demikian dalam proses pembahasan ini saya rasa terjaring kasus di daerah sekitar saya dengan melihat komoditi masyarakat pesisir Kota Ambon dalam *survival* di tengah-tengah pengaruh nya globalisasi. Globalisasi yang melanda Indonesia secara cepat membuka cakrawala baru bagi manajemen organisasi di Indonesia, yang semula hanya tertuju ke lingkungan domestik, menjadi terbuka ke lingkungan global. Manajemen organisasi di Indonesia dipaksa untuk mengikuti olimpiade dalam menghasilkan produk dan jasa, dengan mengikuti aturan-aturan tingkat dunia dalam menyediakan produk dan jasa tersebut bagi masyarakat. Keadaan ini memaksa manajemen organisasi di Indonesia untuk melakukan rekayasa ulang terhadap manajemen yang selama ini digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa. Dalam lingkungan bisnis global, customer telah mengalami perubahan pesat, baik dalam tuntutan mereka maupun cara mereka memenuhi tuntutan mereka.

Menurut (Watloly, 2010) secara filosofi lumbung memiliki dua arti yaitu statis (penyimpan) dan dinamis (keberlanjutan). Arti statis adalah 1) Tempat penyimpanan stok (pangan dan bibit) secara temporer; 2) Tempat menyimpan barang hasil jadi (statis); 3) Dapat dikosongkan sesuai irama dan siklus musim; 4) Terisolasi dari lingkungan habitat; 5) Bukan tempat produk lestari. Sedangkan arti dinamis (keberlanjutan) adalah 1) Tempat diproduksi, bereproduksi berjenis ikan secara lestari; 2) Ajang tabur-tuai yang selalu terisi; 3) Menjadi sentra produksi dan pertumbuhan habitat baru; 4) Menyatu dengan lingkungan habitat, terisi dan berkelanjutan; dan 5) Wilayah tangkap dan produk lestari untuk kesejahteraan masyarakat (Watloly, 2010).

Kesiapan Kota Ambon dilihat dari dimensi kelembagaan dan kebijakan masuk dalam kategori cukup siap dengan nilai 64,82. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan untuk mendukung

usaha perikanan, yaitu kelembagaan keuangan, penyuluhan dan pengawasan. Berdasarkan data primer yang diperoleh peran tiga kelembagaan tersebut sangat berpengaruh bagi keberlanjutan usaha perikanan tangkap di Kota Ambon. Di Kota Ambon terdapat lembaga keuangan formal dan non formal yang dapat memberikan pinjaman modal bagi nelayan. Selain itu kelembagaan pengawasan dan penyuluhan juga semakin baik kinerjanya terlihat dari adanya penurunan tindakan *illegal fishing* serta meningkatnya kepedulian nelayan untuk peran serta dalam pengelolaan sumber daya ikan yang ada di laut. Kebijakan pada dimensi ini maksudnya adalah kebijakan dari pemerintah Kota Ambon yang diterapkan untuk mendukung M-LIN. Meskipun belum ada kebijakan yang spesifik ditujukan untuk mendukung program tersebut namun kebijakan yang sudah ada saat ini terlihat mendukung terpenuhinya ketersediaan stok ikan sepanjang tahun sesuai dengan tujuan dari M-LIN itu sendiri.

Hasil analisis *leverage* atribut dari dimensi kelembagaan dan kebijakan, diketahui bahwa terdapat dua atribut yang sangat sensitif terhadap kinerja status kesiapan Kota Ambon, yaitu: pengorganisasian hak kepemilikan; dan akses terhadap sumber daya ikan. Kedua atribut memiliki pengaruh (*standar error*) dalam dimensi kelembagaan dan kebijakan yang tergolong besar, yaitu masing-masing sebesar 10,78 dan 8,78. Dengan angka yang tergolong besar tersebut, kedua atribut tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit yang menentukan status kesiapan Kota Ambon pada dimensi kelembagaan dan kebijakan.

Penulisan (Siti Hajar Suryawati dan Tajerin, 2015), Bawole dan Apituley (2011) menegaskan bahwa membangun Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional berarti menjadikan daerah tersebut sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu menyuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Maluku menjadi salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar di Indonesia (Bawole, dkk, 2011). Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Melalui pembangunan LIN, maka berbagai infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan terpadu, kawasan industri perikanan, sampai bandara internasional yang mampu membawa hasil tangkap produk perikanan di 3 WPP RI ke pasar internasional juga akan dibangun. LIN akan meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal dengan mengangkat kualitas serta menyediakan jaminan asuransi bagi para nelayan. Lokasi LIN yang terus didorong di Provinsi Maluku bukanlah tanpa alasan, karena provinsi ini memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang melimpah. Provinsi Maluku memiliki tiga titik utama untuk perikanan tangkap yang melimpah atau biasa disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Beberapa titiknya, yaitu titik 714 di Laut Banda, 715 di Laut Halmahera, dan 718 di Laut Arafuru. Dengan dijadikannya Provinsi Maluku sebagai LIN, maka nantinya produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya memiliki estimasi mampu mencapai angka 750.000 ton per tahun. Adanya industri perikanan dan tangkap melalui LIN mampu ini membuka lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja sampai 30 ribu orang.

Oleh karena itu sebagai suatu wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi global, Maluku juga ekonomi saat ini seperti krisis energi dan krisis pangan, memiliki dampak langsung kepada proses pembangunan di Maluku, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kemampuan Maluku dalam kecepatan beradaptasi terhadap perubahan dapat memposisikan gejala tersebut menjadi suatu peluang usaha sebaliknya ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan dapat menimbulkan keterlambatan. Pada saat yang sama Maluku memerlukan suatu strategi pembangunan ekonomi yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan dalam beradaptasi terhadap lingkungan eksternalnya. Perubahan, khususnya yang berasal dari faktor eksternal, seringkali bersifat "keras" dan tidak mengenal belas kasihan. Ini adalah realita operasional dari setiap organisasi dalam masyarakat. Ketidakpastian dari aspek kompetisi, perubahan regulasi, dampak dari kejadian-kejadian global, khususnya pada tingkat permintaan pasar yang terus berubah, membuat setiap organisasi, baik

itu organisasi publik maupun organisasi komersial, harus senantiasa siap untuk menjawab tantangan perubahan tersebut.

Tingkat kecepatan perubahan menuntut setiap organisasi untuk melakukan hal-hal baru yang kemungkinan besar bukan merupakan hal-hal yang telah mereka kuasai dengan baik dan kemungkinan juga bukan merupakan bagian dari core competencies mereka Sebagai wilayah kepulauan, Maluku memiliki banyak sekali first nature advantages, seperti sumber daya kelautan, sumber daya perkebunan dan pertanian, serta sumber daya kehutanan. Mata pencaharian penduduk di Maluku dari sumber sumber ini adalah 72,80%. Merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi penduduk di Maluku untuk melakukan suatu kompetisi dalam memasuki era globalisasi. Keinginan untuk membangun dan mengembangkan pesisir pantai Kota Ambon, agar waterfront yang ada berfungsi maksimal sebagai jantung kota Ambon, pusat jasa dan perdagangan serta urat nadi pergerakan Kota. Pasca tragedi kemanusiaan, maka kebijakan pemerintah membangun pesisir adalah salah satunya untuk memunculkan "citra baru" pada Kota Ambon pasca konflik. Secara struktural area waterfront berfungsi pelayanan dan menjadi pusat orientasi. Pemanfaatan ruang pesisir dilakukan secara optimal dan menampung kegiatan utama kota, kejadian ini betul-betul menjadi perhatian dalam tiga kelompok terpenting yaitu masyarakat, pemerintah dan perguruan tinggi.

Maluku akhiri-hari ini di programkan oleh pemerintah dengan mengelola hasil laut di sekitar laut arafura (lambung ikan nasional) hal ini bisa dilihat pada proses pemerintah daerah akhiri ini dengan mengeksport ikan 2.222 kilogram atau 2.22 ton ikan tuna dengan tujuan negara jepang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan sepenuhnya untuk peningkatan ekspor dari maluku. Ulasan ini memiliki manfaat yang mau disampaikan dalam memahami konsep tersebut dengan komoditi di daerah Maluku yaitu sejauh mana kesiapan masyarakat pesisir dalam era globalisasi dan strategi yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai sasaran yang diharapkan oleh Erik Swyngedouw dalam Transformasi Skala.

Masyarakat pesisir mulai mengalami proses perubahan dan dapat bertahan hidup pada globalisasi apa yang menjadi strategi mereka, pemberdayaan adalah kunci dalam proses perubahan tersebut dengan didorong oleh perguruan tinggi di daerah lewat berbagai program dan aplikasi kebijakan penelitian membuat mesin pengeringan Ikan dengan kualitas baik dan produk ikan bisa diekspor ke pasar sub-nasional dan internasional. Namun dari sisi yang lain dapat dilihat bahwa setiap elit Maluku mengkonstruksi/mengidentifikasi LIN dengan cara yang berbeda-beda sehingga tidak ada dalam satu wacana pembangunan Lin Secara keseluruhan. Misalnya kita semua terjebak dalam memahami "Lin Jadi atau tidak Jadi", atau perpindahan pembangunan Lin itu sendiri. Hal yang seharusnya di bongkar dan pemasangan kembali adalah Kekuatan elit Maluku yang tidak terkonsolidasi dengan baik, misalnya Elit Pusat, Elit Provinsi, dan elit DPRD memiliki tor masing-masing dalam memahami Lin. Atau dengan yang cara yang lain adalah ketika Lin jadi bagaimana kemiskinan di Maluku diurus, atau semacam kesejahteraan sumber daya manusia yang seharusnya menjadi target Maluku di tahun-tahun berikutnya bisa bersaing dengan sumber daya manusia di daerah lain. Keadaan yang ditakutkan adalah Lin sebagai wacana melanggengkan isuh etnik pada pilkada 2024, atau melanggengkan kekuatan elit pusat yang akan bertarung pada pilkada 2024.

LIN secara tujuan sangat mulia, karena hendak menjadikan Maluku sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional dengan memaksimalkan potensi perikanan yang ada melalui kegiatan produksi (penangkapan dan budidaya) secara berkelanjutan (lestari) untuk kesejahteraan rakyat (khususnya rakyat Maluku dan rakyat Indonesia umumnya). Konsep LIN sangat sejalan sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, ayat tiga yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Hal ini sangat jelas bahwa negara (pemerintah) hadir dan berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat Indonesia melalui kebijakan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia secara adil dan bijaksana. Dengan kata lain implementasi LIN jangan menjadi kebijakan yang justru menimbulkan bencana, karena ternyata bertujuan untuk memberikan karpet merah bagi para investor semata, sedangkan kesejahteraan masyarakat (Maluku) dikali nol. Kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam implementasi dan penentuan arah kebijakan LIN di Provinsi Maluku, karena berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan, kelestarian dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sehingga implementasi LIN jangan sampai ditunggangi berbagai macam kepentingan yang hanya bertujuan menjadikan Maluku sebagai sapi perah dalam menghasilkan keuntungan bagi segelintir orang, elit maupun pengusaha. Sehingga ada beberapa catatan yang dapat dijadikan pijakan bagi pemerintah agar implementasi LIN di Maluku benar-benar dapat memaksimalkan potensi sumber daya perikanan secara berkelanjutan serta mampu menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan bagi masyarakat Maluku dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional. Pertama, kebijakan peta jalan LIN. Tentunya sebagai program nasional, LIN harus memiliki peta jalan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Kebijakan pembuatan dan penyusunan peta jalan tersebut jangan diambil alih oleh pemerintah pusat, namun wajib dan harus diserahkan ke daerah dalam hal ini Pemprov Maluku. Kebijakan tersebut tidaklah berlebihan, karena secara historis pengetahuan mulai dari kelemahan, kekuatan, peluang serta tantangan terkait implementasi LIN di Maluku ya hanya orang Maluku (Pemprov Maluku) yang mengetahuinya, karena mereka mengenal betul karakteristik wilayah Maluku. Sehingga diharapkan pemerintah pusat jangan arogan dan sok tahu dengan mengambil alih kebijakan menyusun peta jalan LIN tersebut tanpa peran Pemprov Maluku.

Selanjutnya penyusunan Peta Jalan LIN, Pemprov Maluku harus benar-benar melibatkan, mengakomodir dan memberikan peran kepada masyarakat lokal dalam program LIN agar tujuan LIN benar-benar tercapai, yaitu menjadikan Maluku sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal khususnya nelayan, bukan kesejahteraan bagi segelintir orang saja. Kedua, kebijakan implementasi LIN tidak memicu ocean grabbing. Kebutuhan lahan baru untuk pembangunan infrastruktur pendukung implementasi LIN di Provinsi Maluku tidak dapat dielakkan, namun yang perlu digaris bawahi adalah jangan sampai masyarakat lokal di lokasi implementasi LIN justru kehilangan akses terhadap ruang serta sumber daya dalam hal ini laut yang sudah mereka andalkan untuk kegiatan ekonomi secara turun-temurun.

Lebih celakanya lagi masyarakat lokal justru terusir baik itu secara sengaja maupun tidak dari kampung halaman mereka akibat dari pembangunan yang mengatasnamakan kesejahteraan mereka. Tentu hal tersebut sangat tidak diharapkan sama sekali, karena itu merupakan bentuk penindasan dan penjajahan di era modern saat ini. Justru yang diharapkan dengan adanya program LIN, akses masyarakat terhadap sumber daya laut semakin terjamin serta dapat meningkatkan pendapatan mereka karena adanya fasilitas pembangunan infrastruktur seperti kemudahan dalam memperoleh es dengan harga yang murah, kemudahan dalam memperoleh BBM dengan harga yang terjangkau, hasil tangkapan memiliki harga yang bersaing, dan lain-lain. Ketiga, pemanfaatan sumber daya perikanan yang lestari dan berkelanjutan. Implementasi LIN di Provinsi Maluku harus diarahkan kepada bentuk pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bukan eksploitasi berlebihan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Artinya potensi perikanan yang ada di Provinsi Maluku dimaksimalkan pemanfaatannya secara efektif dan efisien agar mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta berkelanjutan (lestari). Hal tersebut tidak dapat ditawar dalam bentuk apapun juga, karena pemanfaatan kekayaan sumber daya perikanan yang ada di Provinsi Maluku bukan hanya diperuntukkan bagi generasi saat ini saja, namun generasi selanjutnya dimasa yang akan datang.

4 Kesimpulan

Penulisan ini tadinya mencoba melihat nilai kelokalan dari ikan Maluku untuk menerobos masuk ke pasar global, tetapi setelah diskusi ulang nilai struktur ikan Maluku belum mampu menerobos pada skala global dan ini masih ada dalam proses adaptasi dan kesiapan untuk menerobos dengan segala sekma, antara lain penetapan tiga titik LIN pada laut Maluku, proses terkait market antara lain Jepang, Cina, Singapura, Australia, Filipina dan Thailand, ada juga persiapan dalam bentuk pembangunan industri ikan, pelabuhan dan bandara sebagai perhitungan strategis memproduksi ikan dan berada pada daerah sekitar Maluku, seperti ; Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Buru, Buru Selatan, dan Kota Ambon. Tingkat kesiapan Kota Ambon sebagai salah satu lokasi pendukung M-LIN masuk dalam kategori siap. Masing-masing dimensi sudah siap untuk menjadi pusat penyedia layanan barang dan jasa serta peningkatan mutu dan kualitas lingkungan. Pada saat yang sama Ambon sebagai ibu kota provinsi dicanangkan sebagai kota ikan karena dinilai produksi perikanan yang cukup besar.

Dari keenam dimensi (ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, infrastruktur, serta kelembagaan dan kebijakan), tingkat status kesiapan lumbung ikan nasional (LIN) di tingkat kota dan kabupaten bervariasi yaitu antara “siap” dan “cukup siap”.

- a) Dari dimensi ekologi, terdapat dua atribut yang sensitif dari dimensi ekologi, yaitu: rentang migrasi ikan dan penurunan jumlah hasil tangkapan.
- b) Dari dimensi ekonomi, terdapat tiga atribut yang sensitif, yaitu: daya saing, peluang pasar, dan tenaga kerja perikanan.
- c) Dari dimensi sosial, terdapat dua atribut yang sensitif dari dimensi sosial, yaitu: partisipasi pelaku usaha perikanan dan status konflik.
- d) Dari dimensi teknologi, terdapat tiga atribut yang sensitif dari dimensi teknologi, yaitu: teknologi pengurangan *by-catch*; teknologi penanganan ikan di atas kapal; dan teknologi pengolahan ikan hasil tangkapan.
- e) Dari dimensi infrastruktur, terdapat empat atribut yang sensitif dari dimensi infrastruktur, yaitu: infrastruktur jalan; infrastruktur air bersih; infrastruktur listrik; dan infrastruktur gudang *cold storage*.
- f) Dari dimensi kelembagaan dan kebijakan, terdapat empat atribut yang sensitif dari dimensi kelembagaan dan kebijakan, yaitu: hak kepemilikan; peran lembaga penyuluhan; akses terhadap sumberdaya ikan; dan peran kelembagaan keuangan.

Analisis kesiapan ini menunjukkan kondisi saat ini (*existing condition*). Oleh karena itu untuk melihat kesiapan di masa yang akan datang, perlu dilakukan analisis tambahan berdasarkan hasil analisis leverage terhadap atribut yang sensitif. Dengan manifestasi LIN Maluku seperti ini kita yakin Maluku akan mampu menerobos dengan komoditas lokalnya ke pasar global. Sehingga refleksi yang lain dapat di banyakkan menjelang pilkada 2024 LIN, dijadikan sebagai salah satu isu politik lokal untuk menguntungkan kelompok tertentu.

Referensi

- Berhitu, P. T., & Matakupan, Y. (2010). Kajian Kelayakan Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ambon Sebagai Kota Pantai (Ambon Water Front City). *Teknologi*, 7, 772. http://paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo/ppr_iteminfo_Ink.php?id=188
- Bawole, Dionisius, and Y. M. T. N. (2011). Apituley. "Maluku sebagai lumbung ikan nasional: Tinjauan atas suatu kebijakan." *Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Pulau-Pulau Kecil*.
- Gary Gereffi. (2001). Globalisasi, Rantai Nilai dan Pembangunan. *Institute of Development Studies*, Volume, 15 hlm,01-02.
- Ginting, A. M. (2013). Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Politica : Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Vol 4(1)*. Pusat Penelitian: Badan Keahlian DPR-RI. Indonesia
- Siti Hajar Suryawati dan Tajerin. (2015). Penilaian Kesiapan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional. *Kelautan dan perikanan*, 12-18.
- Mufidah, L., Rachmawati, E., & Mayang, C. (2021). Kajian Pustaka Jenis Starter, Lama Fermentasi, Dan Sifat Organoleptik Yoghurt Susu Kedelai. *Jurnal Socia Akademika*, 7(1), 17-23.
- Watloly. (2010). Filosofi Lumbung Ikan: Implikasi bagi Maluku dan Indonesia. *Materi Ceramah Seminar Nasional: Maluku Sebagai LIN*, 24.
- Swyngedouw, E. (2004). Globalization or 'glocalisation'? Networks, territories and rescaling. *Cambridge Review of International Affairs*, 17(1), 25-48.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian teori dalam penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49-58.
- Zulham, A., R. Yusuf, B. Wardono, Sastrawidjaja, E. S. Luhur, R. E. Rachmawati dan T. Hasanah. 2013. Kajian Desain Program dan Implementasi Industrialisasi Berbasis Perikanan Tangkap Laut. Laporan Teknis Penelitian. Balai Besar Penelitian Sosek KP. Badan Penelitian dan Kelautan. KKP. Jakarta

Internet

- <https://www.antaraneews.com/berita/1697150/edhy-prabowo-lepas-ekspor-222-ton-tuna-maluku-ke-jepang>
- <https://maritim.go.id/upayakan-peningkatan-produksi-perikanan-tangkap-budidaya-pemerintah-dorong/>